



SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 54 TAHUN 2019
TENTANG

PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
DAN PEMERINTAH REPUBLIK SAN MARINO UNTUK PERTUKARAN
INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN (*AGREEMENT
BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE
GOVERNMENT OF REPUBLIC OF SAN MARINO FOR THE EXCHANGE OF
INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS*)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk memperluas akses dalam mendapatkan informasi berkenaan dengan perpajakan, Pemerintah Republik Indonesia perlu melakukan kerja sama pertukaran informasi di bidang perpajakan dengan Pemerintah Republik San Marino;
 - b. bahwa di New York, Amerika Serikat pada tanggal 25 September 2013, Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik San Marino telah menandatangani Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik San Marino untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Republic of San Marino for the Exchange of Information relating to Tax Matters*);
 - c. bahwa Persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu disahkan sebagai dasar hukum pemberlakuan Persetujuan yang mengatur pertukaran informasi di bidang perpajakan dalam rangka mencegah pengelakan atau penghindaran pajak di kedua negara;

d. bahwa . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik San Marino untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Republic of San Marino for the Exchange of Information relating to Tax Matters*);

Mengingat:

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAN PEMERINTAH REPUBLIK SAN MARINO UNTUK PERTUKARAN INFORMASI BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN (*AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF SAN MARINO FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS*).

Pasal 1 . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

- (1) Mengesahkan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik San Marino untuk Pertukaran Informasi Berkenaan dengan Keperluan Perpajakan (*Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Republic of San Marino for the Exchange of Information relating to Tax Matters*) yang telah ditandatangani di New York, Amerika Serikat pada tanggal 25 September 2013.
- (2) Salinan naskah asli Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bahasa Indonesia, bahasa Italia, dan bahasa Inggris sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2019

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 Agustus 2019

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 145

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Hukum dan
Perundang-undangan,



Yusuf Silvana Djaman



REPUBLIK INDONESIA

PERSETUJUAN ANTARA

PEMERINTAH REPUBLIK SAN MARINO

DAN

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

UNTUK PERTUKARAN INFORMASI

BERKENAAN DENGAN KEPERLUAN PERPAJAKAN

Bahwa Pemerintah Republik San Marino dan Pemerintah Republik Indonesia (Para Pihak) berkeinginan untuk meningkatkan dan memfasilitasi tata cara pertukaran informasi yang berkenaan dengan semua keperluan perpajakan;

Untuk itu, Para Pihak telah menyetujui untuk mengadakan persetujuan berikut ini yang berisi kewajiban-kewajiban yang mengikat kedua belah Pihak.

Pasal 1
Objek dan Ruang Lingkup Persetujuan

Pejabat yang berwenang dari Para Pihak harus memberikan bantuan melalui pertukaran informasi yang dianggap relevan dengan administrasi dan penegakan hukum domestik dari Para Pihak mengenai pajak-pajak yang dicakup oleh Persetujuan ini. Informasi tersebut harus mencakup informasi yang relevan dengan penentuan, penilaian, penegakan hukum, penagihan atau pengembalian pajak tersebut, atas orang/badan sehubungan dengan pengenaan pajak, pemeriksaan pajak, atau penuntutan pidana perpajakan dalam kaitannya dengan orang/badan tersebut. Informasi akan dipertukarkan sesuai dengan ketentuan dalam Persetujuan ini dan dijaga kerahasiaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 8. Hak-hak dan jaminan perlindungan terhadap orang/badan sesuai dengan undang-undang atau ketentuan administrasi Pihak yang diminta informasi tetap berlaku selama hal tersebut tidak terlalu menghalangi atau menunda pertukaran informasi yang efektif.

Pasal 2
Yurisdiksi

Pihak yang dimintakan informasi tidak berkewajiban untuk memberikan informasi yang tidak dipegang oleh otoritasnya, ataupun tidak dimiliki atau dikuasai atau didapat oleh orang/badan yang berada dalam yurisdiksi teritorialnya.

Pasal 3

Pajak-Pajak Yang Tercakup dalam Persetujuan Ini

1. Pajak-pajak yang tercakup dalam Persetujuan ini adalah:
 - a) di Republik San Marino:
 - (i) Pajak Penghasilan Pajak secara umum yang dikenakan terhadap
 - aa) perseorangan;
 - bb) badan hukum dan kepemilikan;
 - (ii) Pajak Impor (Imposta Monofase sulle importazioni).
 - b) di Indonesia:
 - (i) Pajak Penghasilan;
 - (ii) Pajak Pertambahan Nilai.
2. Persetujuan ini berlaku pula untuk semua pajak yang serupa atau pada hakekatnya sama yang dikenakan setelah tanggal penandatanganan Persetujuan ini sebagai tambahan terhadap, atau sebagai pengganti dari pajak-pajak sejenis yang dikenakan setelah tanggal penandatanganan persetujuan sebagai tambahan terhadap atau sebagai pengganti pajak-pajak yang sekarang berlaku, jika Pejabat yang berwenang dari Para Pihak menyetujui. Pejabat-pejabat yang berwenang dari Para Pihak akan memberitahukan satu sama lain setiap perubahan penting dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan dan tatacara mendapatkan informasi yang terkait sebagaimana dicakup oleh Persetujuan ini.

Pasal 4
Pengertian Umum

1. Dalam Persetujuan ini, yang dimaksud dengan istilah:
 - a) "Republik San Marino", bila diartikan secara geografis, berarti wilayah Republik San Marino, termasuk daerah di dalamnya dimana Republik San Marino, berdasarkan hukum internasional, menjalankan hak-hak kedaulatan dan yurisdiksinya;
 - b) "Indonesia" meliputi wilayah Republik Indonesia sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan perundang-undangannya dan bagian-bagian landas kontinen, zona ekonomi eksklusif, dan lautan sekitarnya yang berbatasan di mana Republik Indonesia memiliki kedaulatan, hak-hak kedaulatan atau yurisdiksi sesuai dengan ketentuan di dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Hukum Laut Tahun 1982;
 - c) "pejabat yang berwenang" berarti:
 - (i) dalam hal Pemerintah Republik San Marino, Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah;
 - (ii) dalam hal Pemerintah Republik Indonesia, Menteri Keuangan atau wakilnya yang sah;
 - d) "orang/badan" mencakup orang pribadi, badan hukum atau kumpulan dari keduanya;
 - e) "perseroan" berarti setiap badan hukum atau setiap entitas yang untuk tujuan pemungutan pajak diperlakukan sebagai suatu badan hukum;
 - f) "perseroan masuk bursa" berarti perseroan dimana bagian utama dari kelompok sahamnya terdaftar di bursa efek yang diakui dan saham-

saham yang terdaftar tersebut dapat dengan mudah dibeli atau dijual oleh publik. Saham-saham dapat dibeli atau dijual "oleh publik" jika pembelian atau penjualan saham tidak dibatasi baik secara implisit maupun eksplisit kepada sekelompok investor tertentu;

- g) "bagian utama kelompok saham" berarti bagian atau beberapa bagian dari saham yang mewakili mayoritas hak suara dan nilai perusahaan;
- h) "bursa efek yang diakui" berarti suatu bursa efek yang disepakati oleh Pejabat yang berwenang dari Para Pihak;
- i) "dana atau skema investasi kolektif" berarti setiap instrumen pengumpulan investasi, tanpa memperhatikan bentuk hukumnya. Istilah "Dana atau skema investasi kolektif publik" berarti setiap dana investasi kolektif atau skema yang menyediakan unit, saham, atau kepentingan lain di dalam dana atau skema tersebut dapat dengan mudah dibeli, dijual atau ditebus oleh publik/masyarakat umum. Unit, saham, atau kepentingan lainnya dalam dana atau skema dapat dengan mudah dibeli, dijual atau ditebus oleh publik/masyarakat umum jika pembelian, penjualan atau penebusan tidak secara implisit maupun eksplisit terbatas hanya pada kelompok investor tertentu;
- j) "pajak" berarti setiap jenis pajak yang dicakup oleh Persetujuan ini;
- k) "Pihak peminta" berarti Pihak yang meminta informasi;
- l) "Pihak yang diminta" berarti Pihak yang diminta untuk memberikan informasi;
- m) "tata cara mengumpulkan informasi" berarti hukum dan administrasi atau prosedur hukum yang memungkinkan suatu Pihak mendapatkan dan memberikan informasi yang diminta;

- n) "informasi" berarti setiap fakta, pernyataan, dokumen atau catatan dalam bentuk apapun;
 - o) "pidana perpajakan" berarti masalah perpajakan yang melibatkan tindakan yang disengaja, baik sebelum maupun sesudah berlakunya Persetujuan ini, yang dapat dituntut berdasarkan hukum pidana dari Pihak Peminta;
 - p) "Hukum pidana" berarti semua peraturan hukum pidana yang ditunjuk di bawah hukum domestik, baik yang terkandung dalam undang-undang pajak, kitab undang-undang hukum pidana atau undang-undang lainnya.
2. Sehubungan dengan diterapkannya Persetujuan ini sewaktu-waktu oleh salah satu pihak, setiap istilah yang tidak didefinisikan dalam persetujuan ini, kecuali jika dari hubungan kalimatnya harus diartikan lain, akan mempunyai arti yang sesuai dengan perundang-undangan negara tersebut, dengan ketentuan bahwa setiap arti yang didasarkan pada undang-undang perpajakan negara tersebut berlaku di atas arti yang didasarkan pada perundang-undangan lainnya dari negara tersebut.

Pasal 5

Pertukaran Informasi Berdasarkan Permintaan

1. Pejabat yang berwenang dari Pihak yang diminta harus memberikan, atas permintaan dari Pihak Peminta, informasi untuk tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1. Informasi tersebut akan dipertukarkan tanpa memperhatikan apakah Pihak yang diminta membutuhkan informasi tersebut untuk tujuan perpajakannya sendiri atau perbuatan yang diperiksa akan merupakan tindak pidana menurut hukum Pihak yang diminta jika perbuatan tersebut terjadi di wilayah Pihak yang diminta. Pejabat yang berwenang dari Pihak Peminta hanya akan membuat permintaan untuk informasi berdasarkan Pasal ini jika tidak bisa memperoleh informasi yang diminta

dengan cara lain, kecuali apabila untuk menempuh cara lain tersebut akan menimbulkan kesulitan yang tidak sepadan.

2. Jika informasi yang dimiliki Pejabat yang berwenang dari Pihak yang diminta tidak mencukupi untuk memenuhi permintaan informasi, Pihak yang diminta, berdasarkan kebijakannya, akan menggunakan semua tatacara yang relevan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan guna memberikan informasi tersebut kepada Pihak Peminta, meskipun Pihak yang diminta tidak membutuhkan informasi tersebut untuk tujuan pajaknya sendiri.
3. Jika secara khusus diminta oleh Pejabat yang berwenang dari Pihak Peminta, Pejabat yang berwenang dari Pihak yang diminta wajib memberikan informasi berdasarkan Pasal ini, sepanjang diperbolehkan berdasarkan hukum domestik, dalam bentuk pernyataan saksi dan salinan otentik dari catatan asli.
4. Setiap Pihak harus menjamin bahwa Pihak yang berwenang untuk tujuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 dan sesuai dengan Pasal 2 Persetujuan ini, atas permintaan yang diterima, memiliki kewenangan untuk mendapatkan dan memberikan:
 - a) informasi yang dimiliki oleh bank, lembaga keuangan lainnya, dan setiap orang/badan termasuk nominee dan wali, yang bertindak sebagai perantara atau berkapasitas sebagai lembaga penjamin (fidusia);
 - b) (i) informasi mengenai status hukum dan pemilik manfaat sebenarnya atas perusahaan, kemitraan, dan orang/badan lainnya, termasuk informasi kepemilikan atas semua orang/badan dalam sebuah rantai kepemilikan;
 - (ii) dalam hal perwalian, informasi terkait pengelola, wali, dan pemilik kepentingan;

(iii) dalam hal yayasan, informasi tentang pendiri, anggota komite organisasi, dan pemilik kepentingan;

(iv) dalam hal skema investasi kolektif, informasi tentang saham, unit dan kepentingan lainnya;

sepanjang Persetujuan ini tidak menimbulkan kewajiban bagi Para Pihak untuk mendapatkan atau memberikan informasi berkenaan dengan perseroan masuk bursa atau dana atau skema investasi kolektif publik kecuali informasi tersebut dapat diperoleh tanpa menimbulkan kesulitan yang tidak sepadan.

5. Setiap permintaan informasi harus dibuat sedetail mungkin dan harus menyampaikan secara tertulis:
- a) identitas orang/badan yang diperiksa atau disidik;
 - b) periode informasi yang diminta;
 - c) sifat informasi yang diminta dan bentuk yang diinginkan oleh Pihak Peminta dalam menerima informasi tersebut;
 - d) tujuan perpajakan atas dibutuhkannya informasi tersebut;
 - e) alasan untuk meyakini bahwa informasi yang diminta adalah relevan dengan administrasi dan penegakan hukum bagi Pihak Peminta terkait dengan orang/badan yang diidentifikasi dalam sub ayat (a) ayat ini;
 - f) dasar untuk meyakini bahwa informasi yang diminta dipegang oleh Pihak yang diminta atau dalam kepemilikan atau dalam kekuasaan atau dapat diperoleh dari orang/badan di dalam wilayah yurisdiksi Pihak yang diminta;

- g) sepanjang diketahui, nama dan alamat setiap orang/badan yang diyakini memiliki atau menguasai atau dapat memperoleh informasi yang diminta;
 - h) pernyataan bahwa permintaan tersebut sesuai dengan hukum dan praktek administrasi Pihak Peminta, bahwa jika informasi yang diminta berada dalam yurisdiksi Pihak Peminta, maka pejabat yang berwenang dari Pihak Peminta akan mampu memperoleh informasi tersebut berdasarkan hukum Pihak Peminta atau sesuai dengan kebiasaan dalam praktik administrasi dan bahwa hal tersebut sudah sesuai dengan Persetujuan ini;
 - i) pernyataan bahwa Pihak Peminta telah melakukan semua cara yang tersedia di wilayahnya sendiri untuk mendapatkan informasi tersebut, kecuali untuk hal-hal yang akan menimbulkan kesulitan yang tidak sepadan.
6. Pejabat yang berwenang dari Pihak yang diminta akan memberitahukan telah diterimanya permohonan permintaan informasi kepada pejabat yang berwenang dari Pihak Peminta dan akan mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk menyampaikan informasi yang diminta kepada Pihak Peminta dengan penundaan seminimal mungkin.

Pasal 6

Pemeriksaan Pajak di Luar Negeri

1. Dengan pemberitahuan yang cukup sebelumnya, Pihak Peminta dapat meminta kepada Pihak yang diminta untuk mengizinkan perwakilan dari Pejabat yang berwenang dari Pihak Peminta untuk memasuki wilayah Pihak yang diminta, sebatas yang diizinkan menurut hukumnya, untuk mewawancarai individu dan memeriksa catatan dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari individu atau orang/badan lainnya yang terkait. Pejabat yang berwenang dari Pihak Peminta harus memberitahukan pejabat yang

berwenang dari Pihak yang diminta mengenai waktu dan tempat pertemuan dimaksud dengan individu yang bersangkutan.

2. Atas permintaan Pejabat yang berwenang dari salah satu Pihak, Pejabat yang berwenang dari Pihak lainnya dapat mengizinkan perwakilan dari Pejabat yang berwenang dari pihak yang disebutkan pertama tadi, untuk hadir pada saat yang diperuntukan dalam pemeriksaan pajak oleh Pihak yang disebutkan kedua.
3. Jika permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 disetujui, Pejabat yang berwenang dari Pihak yang melakukan pemeriksaan harus secepat mungkin memberitahukan Pejabat yang berwenang dari Pihak lainnya tentang waktu dan tempat pemeriksaan, orang yang berwenang atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan pemeriksaan dan prosedur serta kondisi yang dibutuhkan oleh Pihak yang disebutkan pertama untuk melakukan pemeriksaan. Semua keputusan sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan pajak harus dibuat oleh Pihak yang melakukan pemeriksaan.

Pasal 7

Kondisi Penolakan Permintaan

1. Pejabat yang berwenang dari Pihak yang diminta mungkin menolak untuk membantu:
 - a) jika permintaan dibuat tidak sesuai dengan Persetujuan ini;
 - b) jika Pihak Peminta belum menggunakan semua cara yang tersedia di wilayahnya sendiri untuk mendapatkan informasi tersebut, kecuali cara tersebut dapat menimbulkan kesulitan yang tidak sepadan bagi Pihak Peminta; atau
 - c) jika pengungkapan informasi yang diminta akan bertentangan dengan kebijakan publik dari Pihak yang diminta.

2. Persetujuan ini tidak dapat memaksakan kewajiban bagi salah satu Pihak untuk menyediakan informasi yang merupakan hak istimewa sesuai dengan hukum domestik Pihak yang bersangkutan, atau rahasia dagang, bisnis, industri, perniagaan atau keahlian atau proses dagang, sepanjang informasi yang disebutkan dalam Pasal 5 (4) tidak boleh dianggap sebagai rahasia atau proses perdagangan semata-mata berdasarkan alasan tersebut.
3. Permintaan informasi tidak dapat ditolak atas dasar bahwa tagihan pajak yang menjadi dasar permintaan informasi sedang dipersengketakan.
4. Pihak yang diminta tidak berkewajiban untuk memperoleh dan menyampaikan informasi yang tidak mungkin diperoleh berdasarkan perundang-undangan dari negara tersebut untuk tujuan administrasi atau penegakan hukum pajak Negara tersebut atau guna menanggapi permintaan yang sah dalam keadaan yang serupa dari Pihak yang diminta berdasarkan Persetujuan ini.
5. Pihak yang diminta dapat menolak suatu permintaan informasi jika informasi tersebut dibutuhkan oleh Pihak Peminta untuk mengatur atau memaksakan suatu ketentuan hukum pajak pada Pihak Peminta, atau suatu tuntutan yang berhubungan, yang mendiskriminasikan warganegara dari Pihak yang diminta apabila dibandingkan dengan warganegara dari Pihak Peminta dalam keadaan yang sama.

Pasal 8
Kerahasiaan

1. Semua informasi yang diberikan dan diterima oleh Pejabat yang berwenang dari Para Pihak harus dijaga kerahasiaannya.
2. Informasi yang diberikan kepada Pejabat yang berwenang dari Pihak Peminta tidak boleh digunakan untuk tujuan selain tujuan yang dinyatakan

dalam Pasal 1 tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak yang diminta.

3. Informasi yang diberikan hanya dapat diungkapkan kepada orang/badan atau Pihak yang berwenang (termasuk kekuasaan kehakiman dan administrasi) sehubungan dengan tujuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 1 dan digunakan oleh orang/badan atau otoritas tersebut hanya untuk tujuan dimaksud termasuk penentuan banding apapun. Untuk tujuan ini, informasi dapat diungkapkan dalam pengadilan umum atau dalam pembuatan keputusan pengadilan.
4. Informasi yang diberikan kepada Pihak Peminta yang diatur oleh Persetujuan ini tidak boleh diungkapkan ke yurisdiksi/pihak lain.

Pasal 9

Biaya

Kecuali jika Pejabat yang berwenang dari Para Pihak menyepakati lain, biaya-biaya dalam batasan tertentu yang dikeluarkan pada saat memberikan bantuan harus ditanggung oleh Pihak yang diminta, dan biaya diluar batasan tertentu dalam memberikan bantuan (termasuk biaya untuk melibatkan penasihat eksternal sehubungan dengan litigasi atau keadaan lainnya) harus ditanggung oleh Pihak Peminta. Masing-masing Pejabat yang berwenang harus berkonsultasi jika diperlukan sehubungan dengan ketentuan Pasal ini, dan khususnya Pejabat yang berwenang dari Pihak yang diminta harus terlebih dahulu berkonsultasi dengan Pejabat yang berwenang dari Pihak Peminta jika biaya untuk memberikan informasi sehubungan dengan permintaan khusus diperkirakan akan signifikan.

Pasal 10
Tata Cara Persetujuan Bersama

1. Apabila timbul kesulitan atau keraguan di antara Para Pihak mengenai implementasi atau penafsiran Persetujuan ini, para Pejabat yang berwenang harus berusaha untuk menyelesaikan masalah melalui kesepakatan bersama.
2. Sebagai tambahan dari kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, Pejabat yang berwenang dari Para Pihak dapat saling menyetujui prosedur yang digunakan dalam Pasal 5, 6 dan 9.
3. Pejabat-pejabat yang berwenang dari Para Pihak dapat berkomunikasi satu sama lain secara langsung guna mencapai kesepakatan berdasarkan Pasal ini.
4. Para Pihak juga dapat menyepakati bentuk-bentuk lain penyelesaian sengketa apabila diperlukan.

Pasal 11
Saat Mulai Berlaku

1. Masing-masing Pihak akan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang penyelesaian prosedur yang diperlukan menurut hukum nasionalnya untuk berlakunya Persetujuan ini.
2. Persetujuan ini mulai berlaku pada tanggal terakhir dilakukannya pemberitahuan tersebut dan kemudian akan berlaku efektif:
 - a) pada tanggal tersebut untuk masalah pidana perpajakan; dan
 - b) pada tanggal tersebut untuk hal-hal lain yang tercakup dalam Pasal 1, tetapi hanya sehubungan dengan tahun-tahun pajak yang dimulai

pada atau setelah tanggal tersebut, atau dalam hal tidak ada tahun pajak, untuk semua pajak yang dikenakan pada atau setelah tanggal tersebut.

Pasal 12
Berakhirnya Persetujuan

1. Salah satu Pihak dapat mengakhiri Persetujuan ini dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis tentang pengakhiran Persetujuan melalui saluran terkait dari pihak lain yang dipersyaratkan oleh hukum negara tersebut.
2. Pengakhiran Persetujuan tersebut akan berlaku efektif pada hari pertama bulan setelah berakhirnya jangka waktu enam bulan sejak tanggal diterimanya pemberitahuan pengakhiran oleh Pihak lainnya.
3. Jika Persetujuan sudah diakhiri, Para Pihak akan tetap terikat oleh ketentuan-ketentuan Pasal 8 sehubungan dengan informasi yang diperoleh berdasarkan Persetujuan ini.

Sebagai bukti, yang bertandatangan di bawah ini, yang diberi kuasa penuh dari pemerintahnya masing-masing, telah menandatangani Persetujuan ini.

Dibuat di New York pada tanggal 25 September 2013 dalam tiga rangkap asli berbahasa bahasa Indonesia, Itali, dan Inggris, semua naskah memiliki kekuatan hukum yang sama. Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran, maka naskah bahasa Inggris yang berlaku.

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK SAN MARINO**

**UNTUK PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

Signed

Signed

Y.M. Pasquale Valentini
Menteri Luar Negeri

Y.M. Dr. R.W. Marty M. Natalegawa
Menteri Luar Negeri



REPUBLIK INDONESIA

**ACCORDO
FRA
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA
E
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO
SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE**

Il Governo della Repubblica di Indonesia e il Governo della Repubblica di San Marino (le Parti), desiderosi di rafforzare e facilitare i termini e le condizioni che regolano lo scambio di informazioni relativo a tutta la materia fiscale, hanno pattuito di concludere l'accordo seguente, il quale prevede obblighi solamente per le Parti.

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione dell'Accordo

Le autorità competenti delle Parti forniscono assistenza attraverso lo scambio di informazioni che sono verosimilmente pertinenti all'amministrazione ed attuazione delle leggi interne delle Parti concernenti le imposte contemplate nel presente Accordo. Tali informazioni includono informazioni che sono verosimilmente pertinenti alla determinazione, all'accertamento, all'attuazione, alla riscossione o al recupero di tali imposte, in relazione alle persone passibili di tali imposte, ovvero alle indagini in materia fiscale o ai procedimenti in materia fiscale penale relativamente a tali persone. Lo scambio di informazioni ha luogo conformemente alle disposizioni del presente Accordo e secondo le modalità di riservatezza di cui all'articolo 8. I diritti e le misure di salvaguardia garantiti alle persone dalle leggi o dalla pratica amministrativa della Parte

richiesta restano applicabili nella misura in cui non impediscono né ritardano indebitamente lo scambio effettivo di informazioni.

Articolo 2

Giurisdizione

Una Parte richiesta non è tenuta a fornire informazioni che non siano né detenute dalle proprie autorità né in possesso o sotto il controllo di o reperibili da persone che si trovano nella sua giurisdizione territoriale.

Articolo 3

Imposte contemplate

1. Le imposte oggetto del presente Accordo sono:

a) in Indonesia:

- (i) l'imposta sui redditi;
- (ii) l'imposta sul valore aggiunto.

b) nella Repubblica di San Marino:

- (i) l'Imposta Generale sui Redditi che è prelevata:
 - aa) sulle persone fisiche;
 - bb) sulle persone giuridiche e sulle imprese individuali;
- (ii) l'Imposta Monofase sulle Importazioni.

2. Il presente Accordo si applica anche alle imposte identiche o sostanzialmente simili applicate successivamente alla data della firma dell'Accordo in aggiunta o in luogo di imposte esistenti qualora le autorità competenti delle Parti lo convengano. Le autorità competenti di ogni Parte si notificano reciprocamente ogni cambiamento sostanziale apportato alla tassazione e alle relative misure di raccolta delle informazioni previste dall'Accordo.

Articolo 4

Definizioni

1. Ai fini del presente Accordo con il termine:

a) "Indonesia" si intende il territorio della Repubblica di Indonesia come definito dalle sue leggi, e parti della piattaforma continentale, zona economica esclusiva e mari adiacenti sui quali la Repubblica di Indonesia ha sovranità, diritti sovrani o giurisdizione ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982;

b) "Repubblica di San Marino", allorché utilizzato in senso geografico, si intende il territorio della Repubblica di San Marino, ivi compreso qualsiasi altro spazio sul quale la Repubblica di San Marino esercita diritti sovrani o ha giurisdizione conformemente al diritto internazionale;

c) "autorità competente" si intende:

(i) nel caso della Repubblica di Indonesia, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato;

(ii) nel caso della Repubblica di San Marino, il Ministro delle Finanze o il suo rappresentante autorizzato;

d) "persona" si intende una persona fisica, una persona giuridica o ogni altro organismo di persone;

e) "società" si intende qualsiasi ente giuridico o entità trattata come ente giuridico a fini fiscali;

f) "società commercializzata pubblicamente" si intende qualsiasi società la cui principale classe di azioni è quotata in una borsa valori riconosciuta, a patto che le azioni quotate in borsa possano essere prontamente acquistate o vendute dal pubblico. Le azioni possono essere acquistate o vendute "dal pubblico" se la compravendita di azioni non è implicitamente o esplicitamente limitata ad un gruppo ristretto di investitori;

g) "principale classe di azioni" si intende la classe o le classi di azioni che rappresentano la maggioranza del potere di voto e del valore della società;

h) "borsa valori riconosciuta" si intende qualsiasi borsa valori concordata dalle autorità competenti delle Parti;

i) "fondo o schema di investimento comune" si intende qualsiasi veicolo comune di investimento, a prescindere dalla forma giuridica. Con l'espressione "fondo o schema pubblico di investimento comune" si intende qualsiasi fondo o schema di investimento comune, a patto che le quote fondiarie, le quote societarie o altre partecipazioni nel fondo o nello schema possano essere prontamente acquistabili, vendibili o riscattabili dal pubblico. Le quote fondiarie, le quote societarie o altre partecipazioni nel fondo o nello schema possono essere prontamente acquistabili, vendibili o riscattabili "dal pubblico" se l'acquisto, vendita o riscatto non sono implicitamente o esplicitamente limitati ad un gruppo ristretto di investitori;

j) "imposta" si intende ogni imposta alla quale si applica il presente Accordo;

k) "Parte richiedente" si intende la Parte che richiede le informazioni;

l) "Parte richiesta" si intende la Parte e a cui è stato richiesto di fornire informazioni;

m) "misure per la raccolta di informazioni" si intendono le leggi e le procedure amministrative o giudiziarie che consentono ad una Parte di ottenere e fornire le informazioni richieste;

n) "informazioni" si intende ogni fatto, dichiarazione, documento o registrazione in qualsiasi forma;

o) "materia fiscale penale" si intende la materia fiscale che implica una condotta dolosa, precedente o successiva all'entrata in vigore del presente

Accordo, passibile di essere perseguita ai sensi delle leggi penali della Parte richiedente;

p) "leggi penali" si intendono tutte le leggi penali come tali designate ai sensi del diritto interno, a prescindere dal fatto che siano contenute nelle leggi tributarie, nel codice penale o in altri statuti.

2. Per quanto concerne l'applicazione del presente Accordo in ogni momento ad opera di una Parte, ogni termine non definito nell'Accordo stesso, a meno che il contesto non richieda diversamente, ha il significato che ha in quel momento secondo le leggi di quella Parte, e ogni significato ai sensi delle leggi tributarie applicabili di quella Parte prevale sul significato attribuito a quel termine in base ad altre leggi di quella Parte.

Articolo 5

Scambio di informazioni su richiesta

1. L'autorità competente della Parte richiesta fornirà, su richiesta della Parte richiedente, le informazioni di cui all'Articolo 1. Tali informazioni saranno scambiate indipendentemente dal fatto che la Parte richiesta ne abbia necessità per i propri fini fiscali o che la condotta soggetta a verifica costituisca reato ai sensi della legislazione della Parte richiesta, nel caso in cui tale condotta sia stata posta in essere sul territorio di quest'ultima Parte. L'autorità competente della Parte richiedente avanzerà la richiesta di informazioni ai sensi del presente articolo solo qualora non sia in grado di ottenere dette informazioni mediante altri mezzi, salvo il caso in cui il ricorso a tali altri mezzi comporti difficoltà sproporzionate.

2. Se le informazioni in possesso dell'autorità competente della Parte richiesta non sono sufficienti per consentire a tale Parte di soddisfare la richiesta di informazioni, quella Parte ricorre a sua discrezione a tutte le pertinenti misure per la raccolta di informazioni al fine di fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, anche nel caso in cui la Parte richiesta non necessiti di tali informazioni per i propri fini fiscali.

3. Qualora specificatamente interpellata dall'autorità competente di una Parte richiedente, l'autorità competente della Parte richiesta fornirà le informazioni ai sensi del presente Articolo, nella misura consentita dalle proprie leggi interne, sotto forma di deposizioni di testimoni e copie autenticate di documenti originali.

4. Ciascuna Parte assicura che le proprie autorità competenti, per i fini specificati nell'Articolo 1 e conformemente all'Articolo 2 dell'Accordo, abbiano l'autorità di ottenere e fornire su richiesta:

- a) informazioni detenute da banche, altri istituti finanziari e da ogni soggetto, ivi compresi prestanome e amministratori fiduciari, che agisca in qualità di agenzia o fiduciaria;
- b) (i) informazioni relative alla titolarità giuridica ed effettiva di società di capitali, società di persone e altri soggetti, comprese le informazioni sulla proprietà di tutti i soggetti in una catena partecipativa;
 - (ii) nel caso dei trust, informazioni su disponenti, amministratori (*trustee*), guardiani e beneficiari;
 - (iii) nel caso delle fondazioni, le informazioni sui fondatori, i membri del consiglio della fondazione e i beneficiari; e
 - (iv) nel caso di schemi comuni di investimento, informazioni sulle quote societarie, quote fondiarie e altre partecipazioni;

a condizione che il presente Accordo non crei per le Parti un obbligo di ottenere o fornire informazioni sulla proprietà di società quotate in borsa o di fondi e schemi pubblici di investimento comune, purché tali informazioni possano essere ottenute senza dar luogo a difficoltà sproporzionate.

5. Qualsiasi richiesta di informazioni sarà formulata nella maniera più dettagliata possibile e specificherà, per iscritto:

- a) l'identità della persona oggetto di esame o indagine;

- b) il periodo per il quale le informazioni vengono richieste;
- c) la natura delle informazioni richieste e la forma in cui la Parte richiedente desidera riceverle;
- d) il fine fiscale per il quale si richiedono le informazioni;
- e) le ragioni che inducono a ritenere che le informazioni richieste siano verosimilmente rilevanti per l'amministrazione e applicazione fiscale della Parte richiedente, per quanto concerne le persone identificate al punto (a) del presente paragrafo;
- f) i motivi per i quali si ritiene che le informazioni richieste siano detenute dalla Parte richiesta, o che siano in possesso o sotto il controllo di o reperibili da una persona che rientra nella giurisdizione territoriale della Parte richiesta;
- g) se conosciuti, il nome e l'indirizzo di ogni persona ritenuta essere in possesso o in controllo delle informazioni richieste o di poterle reperire;
- h) una dichiarazione attestante che la richiesta è effettuata in conformità alla legislazione e alle pratiche amministrative della Parte richiedente; che, se le informazioni richieste fossero disponibili nell'ambito della giurisdizione della Parte richiedente, l'autorità competente di detta Parte sarebbe in grado di ottenerle ai sensi della sua legislazione o nel normale corso delle pratiche amministrative; che la richiesta è effettuata in conformità al presente Accordo;
- i) una dichiarazione attestante che la Parte richiedente ha esperito tutti i mezzi disponibili sul proprio territorio per ottenere le informazioni, ad eccezione di quelli che comporterebbero difficoltà sproporzionate.

6. L'autorità competente della Parte richiesta confermerà all'autorità competente della Parte richiedente di aver ricevuto la richiesta e farà il possibile

per inoltrare le informazioni richieste alla Parte richiedente nel più breve tempo possibile.

Articolo 6

Accertamenti fiscali all'estero

1. Con un ragionevole anticipo, la Parte richiedente può richiedere alla Parte richiesta di permettere ai rappresentanti della sua autorità competente di entrare nel territorio della Parte richiesta, nella misura consentita dalle proprie leggi, per interrogare individui ed esaminare documenti con il preventivo consenso scritto degli individui stessi o di altre persone interessate. L'autorità competente della Parte richiedente notificherà all'autorità competente della Parte richiesta la data e il luogo della verifica prevista con gli individui interessati.

2. Su richiesta dell'autorità competente di una Parte, l'autorità competente dell'altra Parte può consentire ai rappresentanti dell'autorità competente della prima Parte menzionata di essere presenti durante la fase appropriata di un accertamento fiscale nella seconda Parte menzionata;

3. Se la richiesta di cui al paragrafo 2 viene accolta, l'autorità competente della Parte che effettua l'indagine notificherà quanto prima all'autorità competente dell'altra Parte: la data ed il luogo dell'indagine, l'autorità o il funzionario autorizzato alla conduzione dell'accertamento nonché le procedure e le condizioni richieste dalla prima Parte menzionata per la conduzione dell'accertamento stesso. Tutte le decisioni inerenti alla conduzione dell'accertamento fiscale sono di competenza della Parte che conduce tale accertamento.

Articolo 7

Possibilità di rifiutare una richiesta

1. L'autorità competente della Parte richiesta può rifiutare di prestare assistenza:
 - a) qualora la richiesta non sia effettuata in conformità al presente Accordo;
 - b) qualora la Parte richiedente non abbia esperito tutti i mezzi a sua disposizione per l'ottenimento delle informazioni, tranne il caso in cui il ricorso a tali mezzi comportasse difficoltà sproporzionate; o
 - c) qualora la comunicazione delle informazioni fosse contraria all'ordine pubblico della Parte richiesta.
2. Le disposizioni del presente Accordo non obbligano una Parte a fornire informazioni oggetto di un privilegio legale come previsto dalle leggi interne della relativa Parte o che potrebbero rivelare un segreto commerciale, industriale o professionale o un processo commerciale, purché le informazioni di cui all'Articolo 5, paragrafo 4, non siano considerate come segreto o processo commerciale semplicemente per questa ragione.
3. Una richiesta di informazioni non può essere respinta adducendo il motivo che il credito fiscale che ha dato luogo alla richiesta è oggetto di contenzioso.
4. La Parte richiesta non sarà tenuta ad ottenere e fornire informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere ai sensi delle proprie leggi ai fini dell'amministrazione o applicazione delle proprie leggi fiscali o in risposta ad una valida richiesta avanzata in analoghe circostanze dalla Parte richiesta ai sensi del presente Accordo.
5. La Parte richiesta può rifiutare una richiesta di informazioni se le informazioni sono richieste dalla Parte richiedente per l'amministrazione o

attuazione di una disposizione della legislazione fiscale della Parte richiedente, o altro adempimento connesso, che discrimina un cittadino della Parte richiesta rispetto a un cittadino della Parte richiedente nelle medesime circostanze.

Articolo 8

Riservatezza

1. Tutte le informazioni fornite e ricevute dalle autorità competenti delle Parti saranno riservate.
2. Le informazioni fornite alla competente autorità della Parte richiedente non potranno essere utilizzate per nessuno scopo diverso da quelli di cui all'Articolo 1 senza l'espreso consenso scritto della Parte richiesta.
3. Le informazioni fornite saranno comunicate soltanto alle persone o autorità (ivi comprese le autorità giudiziarie e amministrative) incaricate di perseguire gli scopi di cui all'Articolo 1 e dette persone o autorità utilizzeranno tali informazioni soltanto per tali fini, comprese le decisioni su eventuali ricorsi. Per tali scopi, le informazioni potranno essere comunicate nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
4. Le informazioni fornite alla Parte richiedente ai sensi del presente Accordo non potranno essere comunicate a nessun'altra giurisdizione.

Articolo 9

Costi

A meno che le autorità competenti delle Parti non concordino diversamente, i costi ordinari sostenuti per la fornitura di assistenza sono a carico della Parte richiesta, mentre i costi straordinari sostenuti per fornire l'assistenza (compresi i costi ragionevoli per consulenti esterni in relazione a contenziosi o altro) sono a carico della Parte richiedente. Le rispettive autorità competenti si consultano allorquando necessario relativamente al presente Articolo. In particolare, l'autorità competente della Parte richiesta si consulta preventivamente con l'autorità competente della Parte richiedente nel caso in cui si preveda che i costi per la fornitura di informazioni relativamente ad una specifica richiesta siano cospicui.

Articolo 10

Procedura amichevole

1. Laddove insorgano, tra le Parti, difficoltà o dubbi in merito all'applicazione o interpretazione dell'Accordo, le autorità competenti dovranno cercare di risolvere la questione mediante procedura amichevole.
2. In aggiunta alla composizione amichevole di cui al paragrafo 1, le autorità competenti delle Parti possono determinare, di comune accordo, le procedure da utilizzare conformemente agli Articoli 5, 6 e 9.
3. Le autorità competenti delle Parti possono comunicare tra loro direttamente al fine di raggiungere un accordo ai sensi del presente articolo.
4. Le Parti possono anche accordarsi su altre forme di composizione delle controversie qualora fosse necessario.

Articolo 11
Entrata in vigore

1. Ciascuna Parte notificherà all'altra per iscritto l'avvenuto completamento delle procedure previste dalla sua legislazione per l'entrata in vigore del presente Accordo.

2. Il presente Accordo entrerà in vigore alla data della seconda notifica e avrà effetto:
 - a) con riferimento alla materia fiscale penale, a partire da tale data; e

 - b) con riferimento a tutte le altre questioni di cui all'articolo 1, a partire da tale data, ma solo in relazione ai periodi d'imposta che iniziano o sono successivi a tale data o, laddove non vi sia alcun periodo d'imposta, per tutte le imposte che insorgono a partire da tale data.

Articolo 12
Denuncia

1. Ognuna delle Parti può denunciare l'Accordo dandone notifica scritta attraverso i pertinenti canali dell'altra Parte come richiesto dalla rispettiva legge.

2. Tale denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dalla data in cui l'altra Parte ha ricevuto la notifica di denuncia.

3. In caso di denuncia dell'Accordo, le Parti restano vincolate dalle disposizioni dell'Articolo 8 con riguardo alle informazioni ottenute conformemente al presente Accordo.

IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, a tal fine debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

FATTO a New York, il 25 Settembre 2013, in duplice esemplare nelle lingue indonesiana, inglese e italiana, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione, prevarrà il testo inglese.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI INDONESIA

Signed

S.E. Dr. R.M. Marty M. Natalegawa
Ministro per gli Affari Esteri

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI SAN MARINO

Signed

S.E. Pasquale Valentini
Segretario di Stato per gli Affari Esteri



REPUBLIK INDONESIA

AGREEMENT BETWEEN

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

AND

THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF SAN MARINO

FOR THE EXCHANGE OF INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS

Whereas the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Republic of San Marino (the Parties) wish to enhance and facilitate the terms and conditions governing the exchange of information relating to all tax matters;

Now, therefore, the Parties have agreed to conclude the following agreement which contains obligations on the part of the Parties only.

Article 1
Object and Scope of the Agreement

The competent authorities of the Parties shall provide assistance through exchange of information that is foreseeably relevant to the administration and enforcement of the domestic laws of the Parties concerning taxes covered by this Agreement. Such information shall include information that is foreseeably relevant to the determination, assessment, enforcement, collection or recovery of such taxes, with respect to persons subject to such taxes, or to the investigation of tax matters or the prosecution of criminal tax matters in relation to such persons. Information shall be exchanged in accordance with the provisions of this Agreement and shall be treated as confidential in the manner provided in Article 8. The rights and safeguards secured to persons by the laws or administrative practice of the requested Party remain applicable to the extent that they do not unduly prevent or delay effective exchange of information.

Article 2
Jurisdiction

A requested Party is not obligated to provide information which is neither held by its authorities nor in the possession of or in the control of or obtainable by persons who are within its territorial jurisdiction.

Article 3
Taxes Covered

1. The taxes which are the subject of this Agreement are:
 - a) in Indonesia:
 - (i) the income tax;
 - (ii) the value added tax;
 - b) in the Republic of San Marino:
 - (i) the General Income Tax which is levied (IGR)
 - aa) on individuals;
 - bb) on bodies corporate and proprietorship;
 - (ii) the Import Tax (Imposta Monofase sulle importazioni).

2. This Agreement shall also apply to any identical taxes imposed after the date of signature of the Agreement in addition to or in place of the existing taxes, or any substantially similar taxes imposed after the date of signature of the Agreement in addition to or in place of the existing taxes if the competent authorities of the Parties so agree. The competent authorities of each Party shall notify the other of any substantial changes to the taxation and related information gathering measures covered by the Agreement.

Article 4
Definitions

1. For the purposes of this Agreement the term:
 - a) "Indonesia" comprises the territory of the Republic of Indonesia as defined in its laws, and parts of the continental shelf, exclusive economic zone and adjacent seas over which the Republic of Indonesia has sovereignty, sovereign rights or jurisdiction in accordance with the United Nations Convention on the Law of the Sea 1982;
 - b) "Republic of San Marino", when used in a geographical sense, means the territory of the Republic of San Marino, including any other area within which the Republic of San Marino, in accordance with international law, exercises sovereign rights or jurisdiction;
 - c) "competent authority" means
 - i) in the case of the Republic of Indonesia, the Minister of Finance or his/her authorized representative;
 - ii) in the case of Republic of San Marino, the Minister of Finance or his/her authorized representative;
 - d) "person" includes a natural person, a legal person or any body or group of persons;
 - e) "company" means any body corporate or any entity that is treated as a body corporate for tax purposes;

- f) "publicly traded company" means any company whose principal class of shares is listed on a recognised stock exchange provided its listed shares can be readily purchased or sold by the public. Shares can be purchased or sold "by the public" if the purchase or sale of shares is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;
- g) "principal class of shares" means the class or classes of shares representing a majority of the voting power and value of the company;
- h) "recognised stock exchange" means any stock exchange agreed upon by the competent authorities of the Parties;
- i) "collective investment fund or scheme" means any pooled investment vehicle, irrespective of legal form. The term "public collective investment fund or scheme" means any collective investment fund or scheme provided the units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed by the public. Units, shares or other interests in the fund or scheme can be readily purchased, sold or redeemed "by the public" if the purchase, sale or redemption is not implicitly or explicitly restricted to a limited group of investors;
- j) "tax" means any tax to which the Agreement applies;
- k) "requesting Party" means the Party requesting information;
- l) "requested Party" means the Party requested to provide information;
- m) "information gathering measures" means laws and administrative or judicial procedures that enable a Party to obtain and provide the requested information;

- n) "information" means any fact, statement, document or record in any form whatever;
- o) "criminal tax matters" means tax matters involving intentional conduct whether before or after the entry into force of this Agreement which is liable to prosecution under the criminal laws of the requesting Party;
- p) "criminal laws" means all criminal laws designated as such under domestic law irrespective of whether contained in the tax laws, the criminal code or other statutes.

2. As regards the application of this Agreement at any time by a Party, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the laws of that Party, any meaning under the applicable tax laws of that Party prevailing over a meaning given to the term under other laws of that Party.

Article 5
Exchange of Information Upon Request

1. The competent authority of the requested Party shall provide upon request by the requesting Party information for the purposes referred to in Article 1. Such information shall be exchanged without regard to whether the requested Party needs such information for its own tax purposes or the conduct being investigated would constitute a crime under the laws of the requested Party if such conduct occurred in the territory of the requested Party. The competent authority of the requesting Party shall only make a request for information pursuant to this Article when it is unable to obtain the requested information by other means, except where recourse to such means would give rise to disproportionate difficulty.

2. If the information in the possession of the competent authority of the requested Party is not sufficient to enable it to comply with the request for information, the requested Party shall use at its own discretion all relevant information gathering measures necessary to provide the requesting Party with the information requested, notwithstanding that the requested Party may not need such information for its own tax purposes.

3. If specifically requested by the competent authority of the requesting Party, the competent authority of the requested Party shall provide information under this Article, to the extent allowable under its domestic laws, in the form of depositions of witnesses and authenticated copies of original records.

4. Each Party shall ensure that its competent authorities for the purposes specified in Article 1 and in accordance with Article 2 of the Agreement, have the authority to obtain and provide upon request:

- a) information held by banks, other financial institutions, and any person including nominees and trustees, acting in an agency or fiduciary capacity;
- b) (i) information regarding the legal and beneficial ownership of companies, partnerships, and other persons, including ownership information on all such persons in an ownership chain;
- (ii) in the case of trusts, information on settlors, trustees, protectors and beneficiaries;
- (iii) in the case of foundations, information on founders, members of the foundation council and beneficiaries; and
- (iv) in the case of collective investment schemes, information on shares, units and other interests;

provided that this Agreement does not create an obligation on either Party to obtain or provide ownership information with respect to publicly traded companies or public collective investment funds or schemes unless such information can be obtained without giving rise to disproportionate difficulties.

5. Any request for information shall be formulated with as much as detail as possible and shall specify in writing:

- (a) the identity of the person under examination or investigation;
- (b) the period for which the information is requested;
- (c) the nature of the information requested and the form in which the requesting Party would prefer to receive it;

- (d) the tax purpose for which the information is sought;
- (e) the reasons for believing that the information requested is foreseeably relevant to tax administration and enforcement of the requesting Party, with respect to the person identified in subparagraph (a) of this paragraph;
- (f) grounds for believing that the information requested is held by the requested Party or is in the possession of or in the control of or obtainable by a person within the territorial jurisdiction of the requested Party;
- (g) to the extent known, the name and address of any person believed to be in the possession of or in the control of or able to obtain the requested information;
- h) a statement that the request is in conformity with the laws and administrative practices of the requesting Party, that if the requested information was within the jurisdiction of the requesting Party, then the competent authority of the requesting Party would be able to obtain the information under the laws of the requesting Party or in the normal course of administrative practice and that it is in conformity with this Agreement;
- (i) a statement that the requesting Party has pursued all means available in its own territory to obtain the information, except those that would give rise to disproportionate difficulties.

6. The competent authority of the requested Party shall acknowledge receipt of the request to the competent authority of the requesting Party and shall use its best endeavours to forward the requested information to the requesting Party with the least reasonable delay.

Article 6
Tax Examinations Abroad

(1) By reasonable notice given in advance, the requesting Parties may request that the requested Party allow representatives of the competent authority of the requesting Party to enter the territory of the requested Party, to the extent permitted under its laws, to interview individuals and examine records with the prior written consent of the individuals or other persons concerned. The competent authority of the requesting Party shall notify the competent authority of the requested Party of the time and place of the intended meeting with the individuals concerned.

(2) At the request of the competent authority of one Party, the competent authority of the other Party may allow representatives of the competent authority of the first-mentioned Party to be present at the appropriate part of a tax examination in the second-mentioned Party;

(3) If the request referred to in paragraph 2 is acceded to, the competent authority of the Party conducting the examination shall, as soon as possible, notify the competent authority of the other Party about the time and place of the examination, the authority or official designated to carry out the examination and the procedures and conditions required by the first-mentioned Party for the conduct of the examination. All decisions with respect to the conduct of the tax examination shall be made by the Party conducting the examination.

Article 7
Possibility of Declining a Request

1. The competent authority of the requested Party may decline to assist:
 - (a) where the request is not made in conformity with this Agreement;
 - (b) where the requesting Party has not pursued all means available in its own territory to obtain the information, except where recourse to such means would give rise to disproportionate difficulty; or
 - (c) where the disclosure of the information requested would be contrary to the public policy of the requested Party.

2. This Agreement shall not impose upon a Party any obligation to provide items subject to legal privilege as provided for under the domestic law of the relevant Party, or any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, provided that information described in Article 5 paragraph (4) shall not by reason of that fact alone be treated as such a secret or trade process.

3. A request for information shall not be refused on the ground that the tax claim giving rise to the request is disputed.

4. The requested Party shall not be required to obtain and provide information which the requesting Party would be unable to obtain under its own laws for the purpose of the administration or enforcement of its own tax laws or in response to a valid request made in similar circumstances from the requested Party under this Agreement.

5. The requested Party may decline a request for information if the information is requested by the requesting Party to administer or enforce a provision of the

tax law of the requesting Party, or any requirement connected therewith, which discriminates against a national of the requested Party as compared with a national of the requesting Party in the same circumstances.

Article 8
Confidentiality

1. All information provided and received by the competent authorities of the Parties shall be kept confidential.

2. Information provided to the competent authority of the requesting Party may not be used for any purpose other than the purposes stated in Article 1 without the prior express written consent of the requested Party.

3. Information provided shall be disclosed only to persons or authorities (including judicial and administrative authorities) concerned with the purposes specified in Article 1 and used by such persons or authorities only for such purposes including the determination of any appeal. For these purposes, information may be disclosed in public court proceedings or in judicial decisions.

4. The information provided to a requesting Party under this Agreement may not be disclosed to any other jurisdiction.

Article 9

Costs

Unless the competent authorities of the Parties otherwise agree, ordinary costs incurred in providing assistance shall be borne by the requested Party, and extraordinary costs in providing assistance (including reasonable costs of engaging external advisers in connection with litigation or otherwise) shall be borne by the requesting Party. The respective competent authorities shall consult as necessary with regard to this Article, and in particular the competent authority of the requested Party shall consult with the competent authority of the requesting Party in advance if the costs of providing information with respect to a specific request are expected to be significant.

Article 10
Mutual Agreement Procedure

1. Where difficulties or doubts arise between the Parties regarding the implementation or interpretation of the Agreement, the competent authorities shall endeavour to resolve the matter by mutual agreement.

2. In addition to the agreements referred to in paragraph 1, the competent authorities of the Parties may mutually agree on the procedures to be used under Articles 5, 6 and 9.

3. The competent authorities of the Parties may communicate with each other directly for the purposes of reaching agreement under this Article.

4. The Parties may also agree on other forms of dispute resolution should this become necessary.

Article 11
Entry into Force

1. Each Party shall notify to the other in writing the completion of the procedure required by its law for the entry into force of this Agreement.
2. This Agreement shall enter into force on the date of the later of these notifications and shall thereupon have effect:
 - (a) for criminal tax matters on that date; and
 - (b) for all other matters covered in Article 1 on that date, but only in respect of taxable periods beginning on or after that date or, where there is no taxable period, all charges to tax arising on or after that date.

Article 12
Termination

1. Either Party may terminate the Agreement by serving a written notice of termination through the relevant channels of the other Party required by its respective law.

2. Such termination shall become effective on the first day of the month following the expiration of a period of six months after the date of receipt of notice of termination by the other Party.

3. If the Agreement is terminated the Parties shall remain bound by the provisions of Article 8 with respect to any information obtained under this Agreement.

In witness whereof, the undersigned, being duly authorised thereto have signed the Agreement.

DONE at New York on the 25th day of September 2013 in 2 (two) identical originals each in the Indonesian, Italian and English languages, all texts being equally authoritative. In case of divergence, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

Signed

H.E. Dr. R.M. Marty M. Natalegawa
Minister for Foreign Affairs

FOR THE GOVERNMENT
OF REPUBLIC OF SAN MARINO

Signed

H.E. Pasquale Valentini
Minister for Foreign and Political Affairs

Salinan naskah resmi
Certified true copy

Nomor : 0082/CTC/04/2019/52
Number

Sulaiman
NIP. 19651025 199103 1 017

Sekretaris Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri, Republik Indonesia
Secretary of Directorate General for Legal Affairs and International Treaties
Ministry of Foreign Affairs, Republic of Indonesia

Tanggal : 09 April 2019
Date

